

A photograph of a paved path lined with tall, mature trees. The scene is misty or foggy, with sunlight filtering through the dense canopy, creating a soft, ethereal glow. The path leads into the distance, flanked by green grass and the dark trunks of the trees.

**ANALISIS NISBAH KEUANGAN
BERBASIS LK PEMERINTAHAN
(*RATIO ANALYSIS*)**

Gagasan Dr Jan Hoesada, KSAP

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	1
ANALISIS NISBAH KEUANGAN.....	1
<i>COMMON SIZE ANALYSIS</i>.....	1
a. Common Size Analysis untuk Neraca.....	2
a.1. Perbandingan rumpun aset dengan jumlah aset.....	2
a.2. Perbandingan pos aset dengan rumpun pos aset.....	2
a.3. Perbandingan pos aset dengan jumlah (seluruh) aset.....	3
a.4. Perbandingan rumpun liabilitas dengan jumlah liabilitas.....	3
a.5. Perbandingan rumpun Liabilitas dengan jumlah liabilitas dan ekuitas.....	3
a.6. Perbandingan Jumlah Liabilitas dengan jumlah Ekuitas (DER).....	4
a.7. Perbandingan Rumpun Ekuitas dengan Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (EDR).....	4
a.8. Perbandingan suatu Pos Ekuitas dengan Jumlah Ekuitas.....	4
b. <i>Common Size Analysis</i> untuk Laporan Operasional.....	4
b.1. Perbandingan sebuah Pos Pendapatan dengan jumlah pendapatan LO.....	4
b.2. Perbandingan sebuah pos Beban LO dengan jumlah Beban LO.....	4
b.3. Perbandingan sebuah pos Beban dengan Pendapatan terkait Beban Tersebut (<i>Proper Matching Cost Against Revenue</i>).....	4
b.4. Perbandingan sebuah pos Beban dalam LO dengan jumlah pendapatan LO....	4
c. <i>Common Size Analysis</i> untuk Laporan Realisasi Anggaran.....	5
c.1. Realisasi sebuah pos anggaran banding anggaran, realisasi yang tak mencapai anggaran dan sebabnya.....	5
c.2. Persentase Anggaran Belanja Modal banding Jumlah Belanja.....	5
c.3. Persentase Anggaran Belanja Pegawai banding seluruh Jumlah Belanja	5
c.4. Persentase Belanja bunga terhadap seluruh jumlah belanja.....	5
c.5. Persentase belanja subsidi terhadap jumlah seluruh belanja.....	5
c.6. Persentase belanja bantuan sosial terhadap seluruh belanja.....	5
c.7. Persentase belanja menurut fungsi terhadap seluruh belanja.....	5
d. <i>Common Size</i> untuk Laporan Arus Kas.....	5

d.1. Persentase arus kas masuk - pendapatan dari aktivitas operasi, khusus pajak, terhadap jumlah arus kas masuk.....	5
d.2. Persentase arus kas masuk - pendapatan dari aktivitas operasi, khusus PNPB, terhadap jumlah arus kas masuk.....	5
d.3. Persentase arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan, khusus jumlah pengembalian hutang pokok terhadap jumlah arus kas keluar.....	5
d.4. Persentase arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan, khusus bunga dibayar terhadap jumlah arus kas keluar.....	5
d.5. Persentase arus kas keluar untuk aktivitas investasi, yaitu Belanja Modal, terhadap jumlah arus kas keluar.....	5
d.6. Persentase arus kas keluar untuk aktivitas operasional, khusus pembayaran Belanja Pegawai, terhadap jumlah arus kas keluar.....	6
d.7. Persentase seluruh arus kas keluar untuk aktivitas operasional entitas, khusus belanja barang, terhadap jumlah arus kas keluar.....	6
d.8. Persentase arus kas keluar untuk pelunasan SUN, Obligasi Negara/Daerah dan sebagainya.....	6
d.9. Persentase arus kas keluar untuk Belanja Tak Terduga, khusus Bencana Alam dan Bencana Terorisme, terhadap jumlah arus kas keluar.....	6
ANALISIS TREN (<i>TREND ANALYSIS</i>).....	6
a. Analisis Tren atau Trend Analysis untuk Neraca.....	6
1. Tren Aset.....	6
2. Tren Jumlah Liabilitas.....	8
3. Tren Jumlah Ekuitas.....	8
b. Analisis Tren atau Trend Analysis untuk Laporan Operasional.....	8
c. Analisis Tren atau Trend Analysis untuk Laporan Perubahan Ekuitas.....	8
d. Analisis Tren atau Trend Analysis untuk Laporan Arus Kas.....	8
ANALISIS NISBAH KEUANGAN (<i>RATIO ANALYSIS</i>).....	9
a. Analisis Nisbah atau Ratio Analysis untuk Neraca.....	9
b. Analisis Nisbah atau Ratio Analysis untuk Laporan Operasional.....	9
c. Analisis Nisbah Antar Komponen LK atau Interstatement Analysis, terutama untuk Neraca & LO.....	9

PENDAHULUAN

Pada suatu pertemuan menjelang akhir tahun 2018 antara BPK dengan KSAP, BPK bertanya; apakah terdapat upaya dan pemikiran KSAP untuk pedoman tafsir dan analisis LK untuk memetik nilai tambah informasi dari LK berbasis SAP, terkait komponen-komponen LK, terutama berbentuk elaborasi dan tafsir informasi termaktub dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), selaras Penjelasan Pasal 30 dan 31 Undang-Undang 17 tahun 2003 yang menyatakan; bahwa tugas LRA selain menyajikan informasi pendapatan dan belanja, LRA juga menjelaskan prestasi kerja kementerian negara, lembaga, dan satuan kerja perangkat daerah dan badan lainnya.

Dibawah ini adalah hasil penelitian maya bersifat pendahuluan, sehingga belum menjawab secara baik amar UU 17 tahun 2003 tersebut. Makalah sebagai lemparan bola pertama, mohon disambut untuk mencari jawaban atas permintaan UU tersebut, dalam kerjasama penelitian BPK dan KSAP, mungkin sepanjang tahun 2019.

ANALISIS NISBAH KEUANGAN

Nisbah keuangan atau *financial ratio* merupakan sebuah teknik akbar dalam analisis Laporan Keuangan, terdiri atas *common-size ratios*, *trend ratios* dan *individual ratio analysis*.

Ratio adalah sebuah **perbandingan** dua hal, dan dari perbandingan tersebut didapatlah pemahaman yang lebih baik dan lebih mendalam tentang berbagai hal yang ingin diketahui analisis Laporan Keuangan.

Analisis Laporan Keuangan menggunakan LK sebagai dasar analisis, analisis tidak menggunakan informasi lain di luar LK. Sebagai misal, pertumbuhan GDP dan *Income* Percapita, jumlah penduduk, luas pemda bukan hasil proses akuntansi berbasis SAP yang bermuara pada sebuah LK, karena itu bukan unsur sah LK Pemerintahan dan bukan bahan baku analisis LK.

Berbagai PSAP boleh jadi memberi ilustrasi atau contoh komponen neraca berupa pos-pos, aset, pos-pos utang atau liabilitas dan pos-pos dalam rumpun ekuitas. Pos tersebut dapat diharapkan tampil pada berbagai neraca pemerintahan, sehingga pos tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis nisbah.

Sama saja, contoh Laporan Operasional, LRA, LAK, dan Laporan Perubahan Ekuitas pada SAP menggambarkan pos-pos yang kemungkinan besar terdapat pada setiap komponen LK tersebut, sehingga analisis pos tertentu dapat dicadangkan sebagai butir-butir yang akan dianalisis.

COMMON SIZE ANALYSIS

Common size analysis adalah sebuah analisis-vertikal, yaitu perbandingan (dalam satuan mata uang) sebuah pos dengan jumlah (dalam satuan mata uang) rumpun pos tersebut (mis. Rp. Saldo Persediaan dibanding Rp. Aset Lancar) atau terhadap rumpun terbesar (mis. persediaan dibanding jumlah (seluruh) aset) untuk mendapat gambaran relatif (biasanya dalam pernyataan %) besar pos tersebut dan analisis/tafsir makna ukuran-besar-relatif tersebut bagi pembaca LK.

Rumpun aset misalnya Aset Lancar dan Aset Non Lancar, Liabilitas Jangka Pendek dan rumpun Liabilitas Jangka Panjang.

Pos aset misalnya, pos kas, pos persediaan, pos piutang, pos aset tetap

b. Common Size Analysis untuk Neraca

a.1. Perbandingan rumpun aset dengan jumlah aset

- Perbandingan rumpun Aset Lancar dengan Jumlah Aset.
- Perbandingan rumpun Aset Tidak Lancar dengan Jumlah Aset.

a.2. Perbandingan pos aset dengan rumpun pos aset

- Perbandingan suatu Pos Aset Lancar dengan Jumlah Aset Lancar
 1. Kas banding Jumlah Aset Lancar, menggambarkan besar dominasi kas atau aset paling likuid dalam rumpun aset lancar.
 2. Piutang banding jumlah aset lancar, menggambarkan besar tugas penagihan setelah tanggal neraca, dasar rencana kerja penagihan tahun yad.
 3. Persediaan banding jumlah aset lancar, analisis bila material, hanya beberapa entitas pemerintahan mempunyai persediaan cukup signifikan.
 4. Piutang Pajak atau pungutan berstatus lancar banding Jumlah aset.
- Perbandingan suatu pos Aset Tidak Lancar dengan Jumlah Aset Tidak Lancar
 1. Besar relatif AT banding jumlah aset tidak lancar, apakah AT cukup untuk melaksanakan tupoksi, apakah prasarana perekonomian seperti jalan, listrik, PDAM dan keamanan telah memadai untuk entitas tersebut, apakah sarana pemerintahan (AT) memadai untuk melaksanakan tupoksi entitas tersebut.
 2. Besar relatif investasi dibanding jumlah aset tidak lancar, mengapa AT lebih kecil dari investasi, apakah AT telah tersedia memadai sehingga kelebihan di investasikan ?
 3. Besar investasi permanen banding jumlah Aset Tidak Lancar, mengapa harus investasi permanen ? Mengapa perlu penyertaan modal pemerintah ?
 4. Adakah investasi yang harus segera dikonversi menjadi AT bila AT dalam kondisi kurang memadai ?
 5. Perbandingan aset gedung dan fasilitas utk pelaksanaan Tupoksi banding seluruh Aset Tetap dan/atau Jumlah Aset Tidak Lancar.
 6. Piutang Pajak atau pungutan berstatus tidak- lancar banding Jumlah asset.

a.3. Perbandingan pos aset dengan jumlah (seluruh) aset

- Perbandingan suatu Pos Aset Lancar dengan Jumlah Aset
 1. Investasi Dana Bergulir banding jumlah Investasi.

2. Investasi obligasi banding jumlah investasi.
3. Investasi Proyek Pembangunan banding jumlah investasi dan/atau jumlah aset tidak lancar.

- Perbandingan suatu pos Aset Tidak Lancar dengan Jumlah Aset

1. Perbandingan Gedung dan Sarana Tupoksi banding Jumlah Aset.
2. Perbandingan Jalan, irigasi, jaringan (Fasos/Fasum) dengan jumlah Aset.

a.4. Perbandingan rumpun liabilitas dengan jumlah liabilitas

- Perbandingan rumpun Liabilitas Jangka Pendek dengan Jumlah Liabilitas.

1. Perbandingan utang PFK dengan Jumlah utang jangka pendek, dan/atau jumlah liabilitas.
2. Perbandingan utang bunga dengan Jumlah utang jangka pendek, dan/atau jumlah liabilitas.
3. Perbandingan utang belanja dengan Jumlah utang jangka pendek, dan/atau jumlah liabilitas.
4. Utang jangka pendek jatuh tempo tahun APBN/D Tahun Depan banding Jumlah Utang.

- Perbandingan rumpun Liabilitas Jangka Panjang dengan Jumlah Liabilitas

1. Utang kepada BI (saldo negatif akun di BI) banding jumlah liabilitas.
2. Utang kepada IMF, WB, ADB dan lembaga dunia banding jumlah liabilitas
3. Utang LN dalam Valas banding jumlah liabilitas
4. Utang Obligasi Pemerintah, SUN dan semacamnya banding jumlah Liabilitas.

a.5. Perbandingan rumpun Liabilitas dengan jumlah liabilitas dan ekuitas

- Perbandingan rumpun Liabilitas Jangka Pendek dengan Jumlah Liabilitas dan Ekuitas.
- Perbandingan rumpun Liabilitas Jangka Panjang dengan Jumlah Liabilitas dan Ekuitas.

a.6. Perbandingan Jumlah Liabilitas dengan jumlah Ekuitas (DER)

a.7. Perbandingan Rumpun Ekuitas dengan Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (EDR)

a.8. Perbandingan suatu Pos Ekuitas dengan Jumlah Ekuitas

- Pos revaluasi BMN banding jumlah Ekuitas.
- Surplus banding jumlah ekuitas.

b. Common Size Analysis untuk Laporan Operasional

b.1. Perbandingan sebuah Pos Pendapatan dengan jumlah pendapatan LO

- Pendapatan Pajak, Retribusi dan Pungutan banding Jumlah pendapatan LO
- Tiap jenis pendapatan pajak, retribusi, pungutan banding jumlah pendapatan pajak
- Tiap jenis pendapatan pajak, retribusi, pungutan banding jumlah pendapatan entitas
- PNPB banding Jumlah pendapatan entitas
- Tiap jenis PNPB banding jumlah PNPB
- Tiap jenis PNPB banding jumlah pendapatan entitas
- Pendapatan alokasi atau Transfer dari APBN banding jumlah pendapatan
- Pendapatan Luar Biasa banding Jumlah Pendapatan Entitas.

b.2. Perbandingan sebuah pos Beban LO dengan jumlah Beban LO

- Beban belanja pegawai banding jumlah beban LO
- Beban penyusutan banding jumlah beban LO.
- Beban pemeliharaan dan reparasi AT banding jumlah beban LO.
- Beban Bantuan Sosial banding jumlah Beban.
- Beban Luar Biasa banding Jumlah beban LO.

b.3. Perbandingan sebuah pos Beban dengan Pendapatan terkait Beban Tersebut (Proper Matching Cost Against Revenue)

- Pendapatan pungutan/retribusi pariwisata banding beban pemeliharaan & operasional tempat/tujuan pariwisata tersebut.
- Laba bersih atau rugi bersih BLU/D, BUMN, BUMD, BUMDes di bawah entitas LK

b.4. Perbandingan sebuah pos Beban dalam LO dengan jumlah pendapatan LO

- Beban belanja pegawai pada LO banding jumlah pendapatan asli entitas pada LO
- Beban Belanja Barang dan Beban Belanja Pegawai pada LO banding Jumlah pendapatan entitas pada LO.
- Beban keamanan, pemilu dan sebagainya (Pemda) banding jumlah pendapatan transfer via APBN Diterima Pemda.
- Beban bunga pada LO banding jumlah pendapatan LO.

c. Common Size Analysis untuk Laporan Realisasi Anggaran

c.1. Realisasi sebuah pos anggaran banding anggaran, realisasi yang tak mencapai anggaran dan sebabnya.

c.2. Persentase Anggaran Belanja Modal banding Jumlah Belanja

- c.3. Persentase Anggaran Belanja Pegawai banding seluruh Jumlah Belanja**
- c.4. Persentase Belanja bunga terhadap seluruh jumlah belanja**
- c.5. Persentase belanja subsidi terhadap jumlah seluruh belanja**
- c.6. Persentase belanja bantuan sosial terhadap seluruh belanja**
- c.7. Persentase belanja menurut fungsi terhadap seluruh belanja, antara lain:**
 - % Belanja Perlindungan Sosial
 - % Belanja Pelayanan Umum
 - % Belanja Pendidikan
 - % Belanja Pertahanan
 - % Belanja Ketertiban & Keamanan
 - % Belanja Ekonomi
 - % Belanja Perlindungan Lingkungan Hidup
 - % Belanja Perumahan dan Pemukiman
 - % Belanja Kesehatan
 - % Belanja Pariwisata dan Budaya
 - % Belanja Agama

d. *Common Size* untuk Laporan Arus Kas

- d.1. Persentase arus kas masuk - pendapatan dari aktivitas operasi, khusus pajak, terhadap jumlah arus kas masuk**
- d.2. Persentase arus kas masuk - pendapatan dari aktivitas operasi, khusus PNPB, terhadap jumlah arus kas masuk**
- d.3. Persentase arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan, khusus jumlah pengembalian hutang pokok terhadap jumlah arus kas keluar**
- d.4. Persentase arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan, khusus bunga dibayar terhadap jumlah arus kas keluar**
- d.5. Persentase arus kas keluar untuk aktivitas investasi, yaitu Belanja Modal, terhadap jumlah arus kas keluar**
- d.6. Persentase arus kas keluar untuk aktivitas operasional, khusus pembayaran Belanja Pegawai, terhadap jumlah arus kas keluar**
- d.7. Persentase seluruh arus kas keluar untuk aktivitas operasional entitas, khusus belanja barang, terhadap jumlah arus kas keluar**
- d.8. Persentase arus kas keluar untuk pelunasan SUN, Obligasi Negara/Daerah dan semacamnya**
- d.9. Persentase arus kas keluar untuk Belanja Tak Terduga, khusus Bencana Alam dan Bencana Terorisme, terhadap jumlah arus kas keluar**

ANALISIS TREN (*TREND ANALYSIS*)

Tren adalah sebuah lereng masa lalu yang boleh jadi mampu menggambarkan kecenderungan naik-turun suatu komponen LK atau subkomponen LK atau suatu pos dalam LK, sehingga strategi, kebijakan pemerintah atau tujuan suatu pos RAPBN adalah menahan kecenderungan

buruk dan meng-akselerasi kecenderungan baik. Lereng beberapa tahun terakhir, misalnya 3 tahun terakhir memberi gambaran lebih baik daripada lereng atau tren tahunan. Tren tahunan dihitung dengan cara (Saldo suatu pos akhir tahun dibagi saldo pos yang sama awal tahun atau akhir tahun lalu) kali 100%).

Contoh, Piutang pajak akhir tahun 2018 sebesar Rp. 110 T dibagi saldo piutang pajak akhir tahun 2017 sebesar Rp. 100 T adalah $110/100$ atau 1,1. Kemudian $1,1 \times 100\%$ adalah 11% positif atau meningkat 11%, dengan pernyataan Saldo Piutang Pajak akhir 2018 meningkat 11% dibanding saldo tahun lalu.

Bila realisasi APBN 2018 untuk belanja modal sebesar Rp. 1.000 T sementara realisasi APBN 2017 untuk belanja modal sebesar Rp. 1.500 T, maka penurunan belanja modal digambarkan dengan $(100\% - (1.000/1.500 \times 100\%))$.

Tidak semua informasi tren dapat dianalisis, misalnya bila APBN atau Realisasi APBN naik-turun secara tak beraturan dari tahun-ketahun APBN/D.

Tak semua informasi tren bernilai strategis untuk pengambilan keputusan pemerintahan atau masukan berharga bagi penyusunan RAPBN/D.

Karena itu, hanya butir butir tren yang diperkirakan bermanfaat, terdaftar di bawah ini.

a. Analisis Tren atau Trend Analysis untuk Neraca

1. Tren Aset

- 1.1.Tren Saldo AT Infrastruktur
- 1.2.Tren Saldo aset keseluruhan
- 1.3.Tren Saldo Aset Lancar
- 1.4.Tren Saldo Aset Non Lancar
- 1.5.Tren Saldo Aset
- 1.6.Tren Akumulasi Penyusutan AT
- 1.7.Tren Saldo Kas dan bank
- 1.8.Tren Saldo Piutang Pajak
- 1.9.Tren Saldo Piutang PNB
- 1.10. Tren Penyisihan Piutang dan risiko kerugian negara
- 1.11. Tren Saldo Persediaan
- 1.12. Trend saldo pinjaman kepada BUMN/D, BUMDes
- 1.13. Tren Saldo Investasi Wajib (sesuai Tupoksi) Non-Permanen
 - 1.13.1.1. KSO
 - 1.13.1.2. Pengendalian Bersama
 - 1.13.1.3. BLU, UBL dan Bentuk lain
- 1.14. Tren Saldo Investasi Wajib (sesuai Tupoksi) Permanen

- 1.14.1.1. KSO
- 1.14.1.2. Pengendalian Bersama
- 1.14.1.3. BLU, UBL dan Bentuk lain
- 1.15. Tren Saldo Investasi Tak-Wajib
- 1.16. Tren Saldo Aset Tetap-Tanah
- 1.17. Tren Saldo Aset Tetap-Properti untuk pelaksanaan Tupoksi Kepemerintahan
- 1.18. Tren Saldo Aset Tetap- Fasos & Fasum, seperti satelit, MRT, dan Jalan, irigasi, jaringan, pelabuhan
- 1.19. Tren Saldo Aset Tidak Berwujud bagi Tupoksi pemerintahan
- 1.20. Tren Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 1.21. Tren Saldo Properti Investasi

2. Tren Jumlah Liabilitas

- 2.1.Tren Saldo Utang Pemerintah keseluruhan
- 2.2.Tren Saldo Kewajiban keseluruhan
- 2.3.Tren Saldo Kewajiban Jagka Pendek
- 2.4.Tren Saldo Kewajiban Jangka Panjang
- 2.5.Tren Saldo Utang Bunga LN
- 2.6.Tren Bagian Jk Pendek – Utang Jangka penjang
- 2.7.Trend Saldo SUN Beredar
- 2.8.Trend Saldo Obligasi Negara atau pemerintah
- 2.9.Trend Saldo Utang WB, IMF, ADB

3. Tren Jumlah Ekuitas

- 3.1.Tren Saldo Ekuitas keseluruhan
- 3.2.Tren Saldo Akumulasi Revaluasi AT
- 3.3.Tren Saldo Koreksi Persediaan
- 3.4.Tren Saldo Kesalahan Mendasar dan koreksi PSTP.
- 3.5.Tren Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi atau SAP

b. Analisis Tren atau Trend Analysis untuk Laporan Operasional

- 1. Tren Saldo Pendapatan keseluruhan
- 2. Tren Saldo Pendapatan Pajak
- 3. Tren Saldo PNB
- 4. Tren Saldo setiap Pos Pendapatan
- 5. Tren Saldo Beban keseluruhan
- 6. Tren Saldo tiap unsur Beban dalam LO

7. Tren Saldo Beban pasti berulang/ *recurring* & sistemik
8. Tren Saldo Surplus/Defisit Kegiatan Non-Operasional
9. Tren Pendapatan Luar biasa
10. Tren Beban Luar Biasa

c. Analisis Tren atau Trend Analysis untuk Laporan Perubahan Ekuitas

1. Tren Saldo Ekuitas keseluruhan
2. Tren Saldo Akumulasi Revaluasi AT
3. Tren Saldo Koreksi Persediaan
4. Tren Saldo Kesalahan Mendasar dan koreksi PSTP.
5. Tren Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi atau SAP

d. Analisis Tren atau Trend Analysis untuk Laporan Arus Kas

1. Tren surplus/defisit arus kas masuk/keluar aktivitas operasi, analisis pos-pos paling berpengaruh
2. Tren surplus/defisit arus kas masuk/keluar aktivitas investasi, analisis pos-pos paling berpengaruh
3. Tren surplus/defisit arus kas masuk/ keluar aktivitas pendanaan, analisis pos-pos paling berpengaruh
4. Tren surplus/defisit arus kas masuk/keluar aktivitas transitoris, analisis pos-pos paling berpengaruh

ANALISIS NISBAH KEUANGAN (RATIO ANALYSIS)

a. Analisis Nisbah atau Ratio Analysis untuk Neraca

1. Nisbah likuiditas atau Current Ratio atau CA /CL
2. Nisbah kemantapan keuangan jangka panjang atau Solvency Ratio, atau DER atau EDR
3. Nisbah likuiditas ekstrim , Quick Ratio, yaitu $(\text{Kas} + \text{Piutang}) / \text{Utang Jangka Pendek}$
4. Nisbah Kas, Cash Ratio, yaitu $\text{Kas} / \text{Utang Jangka Pendek}$.
5. Nisbah Utang jangka panjang banding Aset Tetap
6. Selisih Revaluasi AT pada Rumpun Ekuitas banding Saldo AT
7. Akumulasi Penyusutan AT banding Saldo Nilai Perolehan AT
8. Akumulasi Amortisasi ATB banding Saldo Nilai Buku ATB

b. Analisis Nisbah atau Ratio Analysis untuk Laporan Operasional

1. Nisbah PAD terhadap Jumlah Belanja
2. Nisbah jumlah pendapatan dibagi jumlah beban

3. Nisbah pendapatan transfer terhadap jumlah pendapatan.
4. Nisbah sebuah Pos Pendapatan dengan Jumlah Pendapatan
5. Nisbah sebuah Pos beban dengan Jumlah Beban.
6. Nisbah Beban Transfer Pemerintah Pusat Kepada Pemda banding seluruh jumlah Belanja Pemerintah Pusat.
7. Nisbah beban Belanja Pegawai terhadap jumlah pendapatan
8. Nisbah beban Belanja Pegawai terhadap jumlah PAD.
9. Rasio alokasi biaya tak langsung (misalnya pemerintahan umum, keamanan publik, kesehatan dan sanitasi, budaya dan rekreasi, pengembangan komunitas BOSS, bunga utang jangka panjang, pekerjaan publik, layanan engineering pemakaman umum) terhadap jumlah belanja operasional, barang, pegawai.

c. Analisis Nisbah Antar Komponen LK atau Interstatement Analysis , terutama untuk Neraca & LO

1. Nisbah Pendapatan Pajak banding Jumlah Belanja
2. Nisbah pendapatan Migas terhadap jumlah belanja
3. Nisbah pertumbuhan Utang LN terhadap belanja modal
4. Nisbah jumlah pendapatan LO dibagi jumlah aset
5. Nisbah Surplus Defisit Operasional terhadap Surplus/Defisit Neto (akhir, bottom line)
6. Nisbah Surplus Defisit Non-Operasional terhadap Surplus/Defisit Neto (akhir, bottom line).
7. Nisbah Pendapatan Transfer terhadap Saldo Akhir Surplus/Defisit LO.
8. Nisbah pendapatan hibah dan sumbangan terhadap Saldo Akhir Surplus/Defisit LO.
9. Nisbah perubahan Saldo Ekuitas LKPP banding Jumlah Transfer APBN ke Pemda.
10. Analisis perubahan anggaran
 - Kenaikan penurunan Belanja Pendidikan
 - Kenaikan penurunan belanja modal
 - Kenaikan atau penurunan berbagai jenis belanja untu kepentingan masyarakat (keamanan, kesehatan, pendidikan, dll)
 - Persentase belanja pegawai terhadap PAD
 - Persentase belanja pegawai terhadap transfer APBN diterima Pemda
 - Rasio belanja pegawai terhadap belanja modal Pemda
 - Persentase kenaikan belanja pegawai di banding tahun lalu
 - Pos PAD baru banding jumlah PAD, tahun anggaran tertentu
 - Rasio pertumbuhan investasi BUMD Pemda, tahun ini di banding tahun baru
 - Rasio pertumbuhan utang Pemda (obligasi Pemda) di banding pertumbuhan belanja modal Pemda
 - Rasio perubahan LO (deficit atau surplus banding perubahan ekuitas entitas (menurun atau meningkat)
 - Rasio APBN/D program banding reasalisasi APBN program

- Rasio APBN/D proyek banding realisasi APBN proyek
- Rasio APBN/D kegiatan banding realisasi APBN kegiatan
- Analisis perubahan saldo investasi dalam KSO dengan pihak swasta, tahun anggaran disbanding tahun lalu
- Analisis perubahan jumlah rekanan atau mitra usaha KSO tahun anggaran dibanding tahun lalu, membaik atau memburuk
- Analisis perubahan hasil bagi-hasil KSO, lintas tahun anggaran, membaik atau memburuk
- Perbandingan jumlah hibah diterima tahun berjalan dengan tahun lalu, membaik atau memburuk
- Perbandingan jumlah hibah diberikan tahun berjalan dengan tahun lalu, membaik atau memburuk
- Perbandingan jumlah hibah bantuan sosial tahun berjalan dengan tahun lalu, membaik atau memburuk
- Rasio pendapatan pajak dibagi seluruh jumlah pendapatan